

Identifikasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Nurul Hikmah
3160111023

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu sumber pendapatan daerah. Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi pajak daerah diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan ditetapkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi tanggung jawab daerah, dan perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan, yaitu Peraturan Daerah, maka Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mulai 1 November 2018 dilakukan dengan menggunakan system online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kata kunci : identifikasi, sistem dan prosedur pemungutan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Nurul Hikmah
3160111023

Acquisition Cost of Land and Building Rights (BPHTB) is a source of regional income. The transfer of BPHTB Charges to local taxes begins with the formulation of policies as outlined in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions. With the stipulation of the Fees for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) being the responsibility of the region, it is necessary to regulate and stipulate a regulation, namely the Regional Regulation. In this case, Sleman Regency issued a Local Regulation No. 14 of 2010 concerning Fees for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). The purpose of this research is to identify the mechanism of implementing BPHTB collection which started on November 12018 which was conducted online and to identify what factors are obstacles to the collection of BPHTB and what efforts have been made by the Regional Finance and Asset Agency of Sleman Regency. The analytical method used is Descriptive Qualitative. Data collection is done by interview, observation and documentation.

Keywords: identify, collection system and procedure, acquisition of land and building rights